



DIBAYANGI KETERBATASAN PEGAWAI Kecamatan di Yogya Berlisensi SPP

YOGYA (KR) - Seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta menandatangani persetujuan bersama untuk menjalankan Standar Pelayanan Publik (SPP) mulai Rabu (4/12). Lisensi SPP bagi kecamatan tersebut merupakan pertama kalinya di Indonesia karena terikat kontrak dengan masyarakat.

Kepala Bagian Organisasi Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutejo mengungkapkan, sebelum dikeluarkan lisensi SPP, seluruh kecamatan sudah mengawali dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) serta pelimpahan sebagian wewenang. "Ini cukup istimewa karena kecamatan menjalin kontrak dengan masyarakat selaku pihak yang dilayani. Di Indonesia, baru Yogya yang memulai," ungkapnya dalam jumpa pers, Selasa (3/12).

Dalam lisensi SPP tersebut, imbuh Kris Sarjono, kecamatan akan melayani 9 jenis perizinan. Antara lain izin penyelenggaraan PKL, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), administrasi kependudukan dan lain sebagainya.

Sedangkan kontrak yang dibangun bersama masyarakat meliputi persyaratan, biaya, sistem pelayanan, jangka waktu penyelesaian hingga sarana dan prasarana. Oleh karena itu, setiap pelayanan perizinan ada batas waktu serta biaya yang terikat. Jika kecamatan tidak menjalankan sesuai kontrak, maka warga bisa mengadukan ke Pemkot. "Setiap bentuk pelanggaran dari kontrak itu, maka langsung ditangani Inspektorat. Camat yang paling bertanggung jawab," tandasnya.

Meskipun demikian, untuk menjalankan lisensi SPP, kecamatan dibayangi dengan keterbatasan pegawai. Kris Sarjono tidak menampik kendala tersebut. Hal ini lantaran dampak moratorium CPNS yang mengakibatkan Pemkot kekurangan tenaga teknis sebanyak 2 ribu orang.

Camat Gondomanan, Agus Arif Nugroho mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim kerja untuk menjalankan lisensi SPP. Menurutnya, dengan tim kerja itu maka keterbatasan pegawai bisa diatasi. Peralannya, petugas di kecamatan akan diarahkan untuk mengedepankan pelayanan publik. "Sejak menjalankan Paten, belum ada persoalan krusial karena sudah ada tim kerja tersendiri," terangnya.

(R-9)-c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Organisasi			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005